

DAFTAR PUSKATA

BUKU

- Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. A. (2023). *Fiqh Siyasah*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- Arifin, F., & Kurnia, F. R. (2019). *Penjabat Kepala Daerah*. Thafa Media.
- Ateng Syafrudin. *Pemerintahan Daerah*.
- Dr. Suratin Eko Supono, S. H., M. H. (2023). *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*.
- Mayo, H. B. (1960). *An Introduction to Democratic Theory*.
- O'Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). *Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (Vol. 4)*. Verlag nicht ermittelbar.
- Samuel, P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press Norman.
- Sarundajang, S. H. (2005). *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, Sebuah Pengantar*.
- Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Sinar Grafika.

UNDANG – UNDANG

No 67 PUU-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi 2021

No. 10 Tahun 2016, Undang – undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No 1 Tahun 2014, Undang – undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi. 15/PUU-XX/2022

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat (1) dan (2).

JURNAL

- Albab AF, M. (2018). Problem Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pilkada. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Dwiranda, I. F., & Anggoro, S. A. (2020). Kandidat Problematik dalam Pilkada Serentak 2015–2018. *Jurnal Transformative*.
- Hoesein, Z. A. (2010). Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*.
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). *Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.
- Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian. *Jurnal IuS*, 4(3).
- Ramdani, D. (2022). Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi. *Crepido*, 2(2).
- Thalhah, H. M. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(3).
- Thalhah, M. (2004). Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Garansi Moral dan Demokrasi? *Unisia*.
- Sandy Mulia Arhdan, & Khairani. (2023). Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah pada Masa Transisi Pilkada 2024.

LAIN – LAIN

- Polri Kaji Ulang Penunjukan Perwira Aktif Sebagai Pj Gubernur. Diakses pada 13 April 2025. <https://nasional.kompas.com/>
- Sania Mashabi & Kristian Erdianto. (2021). *Pilkada Serentak 2024: 101 Kepala Daerah Habis Masa Jabatan pada 2022*. Kompas.com.
- Demokrasi: Pengertian, Sejarah, Prinsip. Diakses pada 28 April, 2025. <https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/>
- Pengertian Demokrasi secara Etimologi .diakses pada 28 April 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/>

Empat Faktor Mengancam Demokrasi - UGM. Diakses pada April 30, 2025.
<https://ugm.ac.id/id/berita/>

Mengenal Penjabat Kepala Daerah. Diakses pada June 5, 2025.
<https://nasional.kompas.com/>

Bawaslu Temukan 19 Masalah Pemilu 2024 diakses pada June 25, 2025.
<https://bawaslu.go.id/id/berita/>